

Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang

Muhammad Arif Hidayatullah ¹⁾, Hartuti Purnaweni ²⁾, Teguh Yuwono ³⁾

^{1), 2), 3)} Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Indonesia
Jl. Prof. Sudarto No. 13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Email Koresponden: cher.arif14@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the process of collaborative governance in handling floods in the city of Semarang. The phenomenon is that the people's mindset is not in line with the disaster mitigation system, the increased risk of flood disasters due to the growth and expansion of settlements and industry, and the lack of optimal coordination in flood handling and rehabilitation. The research objective is to analyze the collaboration process that occurs in handling floods in the city of Semarang and the supporting and inhibiting factors. The research method used is a qualitative method. The results of research show that the collaboration process has been going well, which consists of face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. However, the share understanding indicator is not optimal due to differences in understanding of the problems faced by the private sector and the community with BPBD Semarang City. Supporting factors are network structures that are well built with each other and there is no hierarchy in this network; commitment through the efforts each goes through; trust in one another; information that is easily accessed; and human resources involved. The inhibiting factors are governance, distributive accountability and responsibility, and access to resources. Obstacles encountered can come from the government itself, where there is minimal transparency, no division of decisions that can hinder collaboration, and technical implementation due to constraints on authority that are compartmentalized.

Keywords: *Collaborative Governance, Flood, Semarang*

ABSTRAK

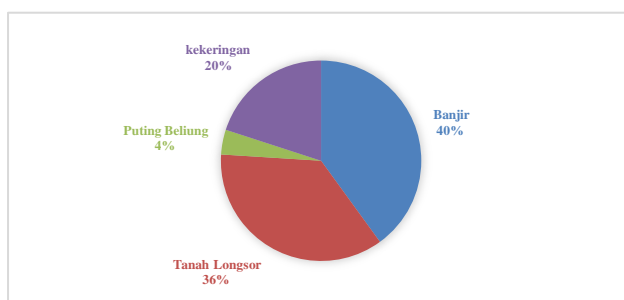
Pembahasan pada studi ini tentang proses *collaborative governance* (CG) dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Adapun fenomenanya, yaitu Adanya bentuk perpektif pada dimasyarakat yang tidak sesuai dengan adanya bentuk mitigasi bencana, peningkatan dari resiko bencana banjir yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perluasan pemukiman dimasyarakat serta industri, koordinasi kurang maksimal dalam penanganan dan rehabilitasi banjir. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian adalah proses kolaborasi pada penelitian ini sudah berjalan dengan baik, yang terdiri dari *face to face dialouge*, *commitment to process*, *trust building*, *share understanding*, dan *intermediate outcomes*. Namun, pada indikator *share understanding* belum optimal dikarenakan adanya perbedaan pemahaman masalah yang dihadapi antara pihak swasta dan masyarakat dengan BPBD Kota Semarang. Adapun faktor yang mendukung adalah struktur jaringan yang terbangun dengan baik satu dengan lainnya dan tidak ada herarki dalam jaringan ini, memiliki komitmen melalui usaha-usaha yang dilalui masing-masing, memiliki kepercayaan satu dengan lainnya, Informasi yang diakses dengan mudah, dan dengan adanya sumber daya manusia terlibat didalamnya. Faktor yang menghambat adalah *governance*, *distributive accountability/responsible*, dan *acces to resouse*. Penghambat yang ditemui bisa datang dari pemerintah itu sendiri, di mana adanya minim transparansi dari pemerintah, tidak adanya pembagian keputusan yang dapat menghambat kolaborasi, dan pelaksanaan teknis karena kendala kewenangan yang terkotak-kotak.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Banjir, Semarang*

I. Pendahuluan

Bencana merupakan sebuah bentuk tragedi atau rangkaian peristiwa yang menimbulkan ancaman atau mempengaruhi sebuah lingkungan kehidupan masyarakat, disebabkan karena faktor manusia, alam, dan non alam, yang berakibat kerusakan kerugian harta benda, korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan psikologis (Anies, 2017). Meskipun banjir itu bentuk bencana, dimana banjir merupakan genangan air yang membanjiri daerah pada dataran rendah, hal ini terjadi karena hujan deras dan tidak adanya respon dari sistem *drainase* yang baik (Khambali, 2017).

Kota Semarang sejauh ini termasuk kota yang rawan terhadap banjir karena Kota Semarang terletak di muara sungai dengan struktur tanah *alluvium* akibat sedimentasi banjir (Mahardika, 2018). Dari data yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dari tahun 2015 sampai 2020, ada 4 (empat) jenis bencana yang terjadi di Kota Semarang, diantaranya: bencana kekeringan, bencana banjir, cuaca yang ekstrim/angin puting beliung dan tanah longsor. Bencana banjir dan tanah longsor adalah bencana yang terjadi pada setiap tahunnya. Sedangkan bencana cuaca ekstrim/angin puting beliung terjadi 15 kali dari tahun 2015 sampai 2020. Selain itu, adapun bencana kekeringan terjadi pada tahun 2019. Dari presentase kejadian bencana di Kota Semarang secara menyeluruh dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Persentase Kejadian Bencana Semarang Tahun 2015- 2020

Sumber: Renstra BPBD Kota Semarang 2020

Permatasari, dkk (2012) mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi Kota Semarang untuk mengelola risiko bencana banjir diantaranya masih kurang optimal dalam pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan BPBD, Kemampuan mengakses teknologi yang dirasa masih kurang, kekurangan fasilitas kendaraan operasional, dan kurangnya kualitas SDM yang memumpungi. Menurut Heru (2020), ada aspek komando dan koordinasi yang terjadi kurang maksimal karena ada banyaknya beberapa pihak berperan dalam penanganan saat terjadinya rehabilitasi dan banjir, diseminasi pada saat bencana banjir yang terjadi di masyarakat, dan diseminasi sebelum terjadinya bencana banjir yang terjadi di masyarakat. Selain adanya permasalahan internal dari Pemerintah di Kota Semarang, terdapat pula permasalahan eksternal yang terjadi, yaitu: masyarakat dinilai masih kurang sadar lingkungan, luas

wilayah yang terbilang besar masih rentan terdampak bencana banjir serta sulit diprediksi masalah cuaca. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat mengenai mitigasi bencana banjir menjadi alasan mengapa masyarakat saat ini masih bertolak belakang dengan persoalan mitigasi bencana banjir yang diupayakan pemerintah (Beatrix, 2020).

Sebuah studi oleh Neise & Diez (2018) di Semarang dan Jakarta memperlihatkan keberhasilan *collaborative governance* dalam penanganan banjir, bagaimana keterlibatan swasta secara signifikan dapat mengurangi risiko bencana banjir. Sunarharum (2016), menemukan adanya tata kelola kolaboratif dapat mengatasi beberapa hambatan sosial, seperti beberapa perbedaan persepsi yang terjadi di pemerintahan dan publik dalam pengelolaan banjir, adanya keterbatasan pada keahlian pengetahuan dan teknis di masyarakat yang terkena dampak, dan adanya keterbatasan kapasitas pemerintah untuk merumuskan prakarsa respons yang ditargetkan. Sebuah studi banding oleh Ghozali et al. (2016), pengelolaan bencana banjir di Samarinda (Indonesia) dan Ayutthaya (Thailand) menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif sangat berguna bagi pemerintah untuk mengukur risiko banjir termasuk kerentanan dan kemampuan beradaptasi masyarakat.

Collaborative governance dibutuhkan dalam penanganan banjir di Kota Semarang dikarenakan dalam penanganan banjir, pemerintah membutuhkan peran dari pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang kebencanaan banjir. Selain itu, *collaborative governance* dalam penanganan banjir dapat memberi masukan ataupun tanggapan dari berbagai sudut yang berbeda, dimana pandangan ini mampu memberikan warna baru atau inovasi baru terhadap penanganan banjir sehingga berdampak terhadap penanganan banjir.

Pada penelitian ini berdasarkan dari beberapa masalah diatas, maka bagaimana Pemerintah Kota Semarang melaksanakan proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir yang memadai?. Kemudian pada rumusan masalah penelitian dirinci menjadi 2 (dua) pertanyaan spesifik sebagai berikut: a) bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang?, b) apa saja faktor yang mempengaruhi proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir yang terjadi di Kota Semarang?. Dari 2 (dua) pertanyaan penelitian di atas akan menjadi jawaban mengenai bentuk peta koordinasi Pemerintah Kota Semarang yang dibutuhkan saat ini dan beberapa organisasi di sekitarnya, selanjutnya direkomendasikan bentuk kerjasama yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Pememerintah Kota Semarang. Selain bertujuan untuk melengkapi dari hasil penelitian yang terdahulu, gambaran deskriptif dari hasil penelitian ini juga menjadi acuan menentukan bentuk skala prioritas dan opsi rekomendasi yang bersifat *win-win solution*.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi yang terjadi yang dilakukan oleh para

stakeholders pada penanganan bencana banjir di Semarang, khususnya kolaborasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Semarang, BPBD Kota Semarang, DPU Kota Semarang, pihak swasta, dan masyarakat lokal.

Pada penelitian ini, *purposive sampling* merupakan teknik sampling yang di pilih oleh peneliti, Informan yang terpilih didapatkan dari informasi narasumber lain yang menghasilkan data untuk melengkapi data, sehingga teknik *snowball sampling* yang di gunakan oleh peneliti. Hal tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis data yang didapatkan dimanfaatkan, oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya: wawancara mendalam (*in-depth interview*), telaah dokumentasi, dan observasi secara langsung.

3 (tiga) teknik pengumpulan data tersebut menjadi validitas data yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu mensinkronisasi dari sejenis data yang diperoleh berbagai data yang digali secara mendasar informasinya oleh peneliti, meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi.

III. Konsep Collaborative Governance

Collaborative governance pertama kali digunakan oleh Dohahue pada tahun 2004 dan direferensikan kembali dalam *public privat collaboration* (Dohahue dan Zeckhauser, 2004, Sun, 2017). *collaborative governance* didefinisikan sebagai panduan dari lembaga tertentu yang melibatkan *stakeholder* lain dalam proses kolektif, konsensus, dan musyawarah (Ansell & Gash, 2007). Oleh sebab itu, *collaborative governance* juga didefinisikan sebagai fase yang tidak dapat dilaksanakan dalam satu elemen, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan publik tersebut. (Emerson et al., 2011). Ansell dan Gash (2007:544), mengungkapkan alasan pentingnya diterapkan *collaborative governance* sebagai bentuk respon dari kegagalan implementasi yang terjadi pada kebijakan yang sudah dilakukan, dan faktor politik untuk penetapan bentuk regulasi serta adanya berbagai biaya yang kemudian dikeluarkan.

Adapun model-model teoritis kolaborasi yaitu: Model Agranoff & Mc Guire, Model Weber et.al., Model Burrler-Coleman, dan Model Ansell and Gash. Dalam penelitian ini menggunakan Model Ansell and Gash. Model tersebut mempunyai 4 (empat) variabel dijadikan bentuk pusat perhatian, diantaranya: kondisi awal, desain kelembagaan, proses kolaborasi, dan kepemimpinan. Dari 4 (empat) variabel diperkecil lagi menjadi bebeapa beberapa sub variabel. Dan variabel pada proses kolaborasi, inti dari model penelitian ini, pada kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan dipresentasikan bentuk pendukung kontribusi yang dinilai penting pada proses kolaborasi.

Pada model tahapan *collaborative governance* dalam Ansell dan Gash (2007:8) diantaranya :

- 1) Kondisi Awal (*Starting Condition*)
- 2) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

- 3) Desain Institusional (*Institutional Design*)
- 4) Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Pada tahapan ini sebuah proses kolaborasi terjadi sebab adanya perkembangan dari pengelolaan urusan publik. Singkatnya proses tersebut dilihat dari awalnya penentuan permasalahan, pengimplementasian dan tujuan. Tahapan pada proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007:15) terdiri dari komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, antara lain:

a. Face to face dialouge (Dialog tatap muka)

Semua proses *collaborative governance* dibangun berdasarkan “dialog antara para pemangku kepentingan”. Tahap dialog ini sebuah bentuk proses berorientasi sebuah kesepakatan/konsensus. Bentuk dialog pada proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi adanya keadaan dimana “saling menguntungkan” sesama pemangku kepentingan jika terjadi adanya sebuah kolaborasi.

b. Trust Building (Membangun kepercayaan)

Membangun sebuah kepercayaan tidak bisa dipisahkan dari proses dialog. Para *stakeholders* diharuskan mampu membangun sebuah kepercayaan antar *stakeholders*. Proses membangun sebuah kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen tinggi dan memakan waktu.

c. Commitment to process (Komitmen proses kolaborasi)

Terjadi kondisi dimana bergantung atau mempunyai ketergantungan cukup tinggi antara pemangku kepentingan yang diharapkan meningkatkan bentuk komitmen untuk terjalin kolaborasi. Penekanan berkolaborasi bukanlah sebuah kesepakatan satu kali akan tetapi bentuk dari proses kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

d. Share Understanding (Pemahaman bersama)

Pada titik tertentu, dimana pemangku kepentingan diharapkan bisa mengembangkan sebuah pemahaman tentang apa yang akan dicapai secara bersama. Pada pemahaman tersebut berupa adanya tujuan yang jelas secara bersama, permasalahan yang dihadapi bersama sudah jelas dan adanya pemahaman mengenai nilai yang akan di capai secara bersama dalam berkolaborasi.

e. Intermediate Outcomes (hasil sementara)

Bentuk kolaborasi memungkinkan berlanjut jika ada hasil tujuan dan adanya keuntungan yang di peroleh dengan kolaborasi yang dirasakan nyata, walaupun ternilai kecil sebagai hasil ; proses antara (pertengahan) dari sebuah proses kolaborasi. Dari hasil kecil (*small win*) menjadi pendorong untuk membangun komitmen dan kepercayaan pemangku kepentingan secara bersama.

Dalam menjalankan *collaborative governance* tentu ada faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung keberhasilannya suatu kolaborasi, namun tentu juga memiliki faktor yang dapat menghambat. Menurut De Seve (2007, dalam buku berjudul "*Creating Public Value Using Managed Networks*"), ada delapan (8) elemen

yang diperhatikan dalam untuk faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi (Deseve, 2007), ada 8 (delapan) elemen diantaranya:

1. *Networked Structure* (struktur jaringan)
2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
3. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan)
4. *Governance*
5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan),
6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas),
7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi),
8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

IV. Pembahasan

A. *Collaborative Governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang

Proses *collaborative governance* didefinisikan sebuah proses membentuk, memfasilitasi, memonitori, dan mengoprasionalisasi sistem organisasi lintas sektor sebagai upaya penyelesaian permasalahan pada kebijakan publik. Retno Sunu Astuti & Hardi Warsono (2020), mengemukakan dalam proses *collaborative governance* ada institusi yang mendorong interaksi beberapa aktor organisasi pemerintah dengan beberapa aktor organisasi non pemerintah tanpa ada bentuk sebuah dominasi mendefinisikan sebuah tujuan, masalah dan metode implementasi. Pada proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) dalam kariem (2021) aspek penunjang keberhasilan yang perlu diperhatikan pada sebuah program diantaranya: *Face to face dialog* (Dialog tatap muka), *Trust Building* (membangun kepercayaan), *Sharheedd Understanding* (berbagi pemahaman), *comitmen to proces* (komitmen bersama) dan *Intermediate Outcomes* (hasil sementara).

Dalam teori *collaborative governance* terdapat 2 hal yang bisa dilihat yaitu *starting condition* dan proses *collaborative governance*. Studi dalam penelitian ini adalah proses *collaborative governance* karena penanganan banjir di Semarang masih ditemukan di beberapa titik maka perlu dilihat bagaimana proses *collaborative governance* yang berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan pada masing-masing indikator proses *collaborative governance* tersebut, sebagai berikut:

1. Tipe *Face to face Dialogue* (Dialog tatap muka)

Dialog tatap muka ataupun interaksi secara langsung sudah dijalankan dengan baik dalam bentuk sosialisasi, berdiskusi dan pelatihan. BPBD Kota Semarang telah mengadakan sosialisasi pada tahun 2022 sebanyak 11 kali terkait penanganan banjir di berbagai tempat yang melibatkan *stakeholders* yang lainnya. Contoh topik pembicaraan pada interaksi tatap muka tersebut yaitu terkait dengan sistem peringatan dini terjadinya banjir serta bagaimana upaya-upaya agar tidak terjadinya banjir.

Pada proses interaksi secara langsung juga terdapat negosiasi dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kata sepakat sehingga meminimalisir terjadinya konflik dalam diskusi yang dilakukan.

Sosialisasi yang diadakan juga ada kesepakatan yang dilakukan mengenai apa yang mereka butuhkan, ide, inovasi, serta apa yang menjadi keluhan mengenai penanganan banjir kemudian dicarikan solusi bersama-sama. Namun, ada juga *stakeholders* percaya dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Maka, disimpulkan bahwa *face to face dialouge* pada proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang dikatakan sudah berhasil ditandai dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sudah mengikut aksi dalam sosialisasi yang diadakan beberapa kali oleh BPBD Kota Semarang serta terjadi kesepakatan dan tidak terjadi konflik antar *stakeholders*. Selain itu, observasi yang dilakukan melalui website bpbk.semarangkota.go.id menunjukkan bahwa proses dialog tatap muka telah terlaksana dihadiri oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.

Face to face dialogue dalam proses CG merupakan suatu tahapan penting yang harus diperhatikan. Ansell dan Gash dalam padangannya menyebutkan bahwa *face to face dialogue* menjadi inti dari tahapan proses selanjutnya, dimana dialog tatap muka diperlukan untuk melihat peluang guna mencapai keuntungan bersama. Berdasarkan pemaparan teori diatas, maka dianalisis bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan teori Ansell dan Gash.

2. Tipe *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Stakeholders sudah saling memiliki rasa kepercayaan satu dengan lainnya dalam proses kolaborasi. Namun, dikatakan bahwa tingkatan kepercayaan masing-masing stakeholder lainnya berbeda-beda. BPBD Kota Semarang menyatakan bentuk kepercayaan mereka adalah dengan mendukung inovasi dari stakeholder lainnya, namun masyarakat mengatakan hal ini tidak didukung dengan penyediaan fasilitas sehingga membuat masyarakat tidak terlibat lebih jauh lagi. Begitu juga dengan pihak swasta yang mempercayakan kepada pemerintah bahwa pemerintah mampu dan siap untuk berkolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat ini juga serta merta harus didukung dengan aksi oleh pemerintah. Terabaikan rasa kepercayaan yang dimiliki masyarakat hanya akan memberikan efek traumatis kepada masyarakat itu sendiri, sehingga hal-hal seperti ini harus diminimalisir untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Rasa kepercayaan ini memunculkan komitmen para stakeholder sehingga dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dan memberikan hasil maksimal pada proses kolaborasi. Masing-masing stakeholder sudah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses kolaborasi penanganan banjir di Kota Semarang. Mereka sama-sama memiliki komitmen untuk berperan dalam penanganan banjir melalui caranya masing-masing. Namun, dalam menjalankan komitmennya masyarakat masih merasakan bahwa pemerintah sudah serius dalam penanganannya banjir namun masyarakat belum semuanya untuk berkomitmen dalam penanganan banjir. Hasil observasi menunjukkan ketika

membangun kepercayaan ditunjukkan aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pihak swasta sebagai pengembangan inovasi dan ide guna menanggulangi banjir. Selain itu, juga diikuti dengan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas bagi masyarakat lokal yang berhubungan dengan penanganan banjir seperti pembangunan sistem peringatan dini dan lain-lain.

Ansell dan Gash menyampaikan pandangannya mengenai *trust building* atau membangun kepercayaan sebagai bentuk tahapan yang tidak terpisahkan dengan *face to face dialogue*. Stakeholders dalam menjalankan kolaborasi harus membangun rasa kepercayaan di antar mereka sehingga rasa percaya yang dimiliki dapat mengurangi rasa curiga dan menumbuhkan komitmen mereka sehingga akan menciptakan proses kolaborasi yang lebih mudah. Penelitian di atas menunjukkan hasil bahwa stakeholder dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah saling memiliki kepercayaan yang ditunjukkan dengan pemerintah mempercayakan kepada stakeholder lain untuk dapat menanggulangi banjir dan menerima inovasi-inovasi yang diinginkan dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Selain itu, stakeholder lainnya mempercayai yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan banjir di Kota Semarang dan mereka berperan serta dalam pelaksanaan program tersebut sebagai bentuk komitmen mereka pada proses kolaborasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka di analisis bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash bahwa proses kolaborasi tidak dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya kepercayaan diantara stakeholders. *Stakeholders* dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah memiliki rasa kepercayaan yang ditunjukkan dengan pemerintah dan masyarakat peduli untuk penanganan banjir di Kota Semarang dan dikatakan bahwa tahapan ini sudah berhasil.

3. Tipe Commitment to Process (Komitmen Terhadap Proses)

BPBD Kota Semarang mengakui bahwa dalam komitmen untuk mencapai tujuan keterbukaan sudah tercipta diantara mereka, pemerintah terbuka kepada seluruh pihak yang berkaitan, begitu juga dengan yang lainnya. Stakeholder sudah memiliki perasaan saling membutuhkan, kebersamaan dan transparansi dalam proses kolaborasi penanganan banjir di Kota Semarang. Namun, menurut stakeholders lainnya baik pihak swasta serta masyarakat, keterbukaan yang dirasakan daripada BPBD Kota Semarang masih hanya sebatas transparansi program-program penanganan banjir saja, belum pada hal yang lainnya. Transparansi yang ada sudah mempermudah jalannya kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholder lain. Transparansi dilakukan atas dasar saling menghargai antar stakeholders dalam menjalankan proses kolaborasi itu. Namun, sejauh ini pihak BPBD masih hanya terbuka mengenai program yang akan dilakukan. Keterbukaan untuk dapat saling mengetahui apa yang menjadi kekurangan nyatanya belum dilakukan

sehingga apa yang menjadi kendala dan hambatan masih sulit untuk dilakukan. Pihak swasta berharap kepada pihak BPBD untuk boleh berbagi atas apa yang terjadi dan dihadapi oleh pihak BPBD kepada yang lainnya. Perasaan saling membutuhkan, memiliki kebersamaan dan transparansi serta dibarengi dengan rasa kepercayaan dimiliki tentu akan membentuk komitmen stakeholders menjalankan proses kolaborasi. Suatu komitmen ketika mempunyai tujuan dapat berjalan baik apabila seluruh komponen dalam kolaborasi sudah saling memiliki rasa saling membutuhkan dan memiliki dalam berjalannya proses kolaborasi.

Ansell dan Gash menyebutkan bahwa komitmen bergantung pada rasa percaya sehingga akan menghormati stakeholder lainnya dan terciptanya transparansi. Selain itu, stakeholders harus merasa yakin dengan komitmen yang dimiliki. Komitmen juga dikatakan dapat meningkat dengan meningkatnya keterlibatan stakeholders dalam proses kolaborasi, serta rasa saling memiliki mampu menjelaskan rasa tanggung jawab bersama. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa para stakeholder proses kolaborasi sudah memiliki rasa saling membutuhkan satu dengan lainnya, saling memiliki kebersamaan dalam proses, dan sudah adanya transparansi yang dilakukan antar stakeholders dalam penanganan banjir di Kota Semarang sehingga dengan memiliki perasaan ini akan memudahkan proses kolaborasi tersebut dan dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang menunjukkan dengan perasaan saling membutuhkan akan menciptakan keuntungan dengan keberadaan mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, dianalisis bahwa hasil penelitian pada tahapan ini sudah sesuai dengan dengan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash yang menyatakan komitmen terhadap proses menjadi faktor penting pada kolaborasi sehingga dalam prosesnya mereka akan menciptakan keuntungan bersama. Stakeholders dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah memiliki komitmen yang sehingga tahapan ini berhasil.

4. Tipe Shared Understanding (Pemahaman bersama)

Para stakeholder dalam menjalankan proses kolaborasi penanganan banjir di Kota Semarang sudah memahami apa yang menjadi visi dan misi mereka bersama. Visi ataupun tujuan mereka yaitu Kota Semarang bebas banjir. Masing-masing stakeholder tentu memiliki misi atau cara yang berbeda sesuai dengan peran dan tanggungjawab untuk mencapai visi bersama.

Berbeda dengan pemahaman visi dan misi yang sama, dalam pemahaman masalah nyatanya stakeholders memiliki pandangan yang berbeda. Pihak masyarakat lokal menyampaikan masalah yang dihadapi mereka adalah masih terdapat masyarakat yang kurang kesadaran tentang banjir dan juga saluran air seperti got yang kurang maksimal lebar atau kedalamannya. Pernyataan berbeda disampaikan oleh BPBD Kota Semarang mengatakan bahwa masalah yang dihadapi yaitu soal sungai yang tidak bisa secara langsung di

jangkau oleh BPBD karena kewenangannya ada Dinas PU.

Perbedaan pemahaman masalah yang terjadi antar stakeholders menjadi suatu hambatan yang baru apabila tidak dapat diselesaikan. Dalam *shared understanding* ada 2 komponen yang memberikan hasil berbeda, yaitu pemahaman visi dan misi yang telah berhasil, sedangkan pemahaman masalah belum berhasil. Pemahaman akan masalah yang belum berhasil memunculkan 2 isu atau topik pembahasan yang penting untuk ditinjau, yaitu 1) isu masalah dari pemerintah mengenai sungai yang tidak bisa secara langsung dijangkau oleh BPBD Kota Semarang karena kewenangannya ada Dinas PU, dan 2) isu masalah dari masyarakat masih terdapat masyarakat yang kurang kesadaran tentang banjir dan juga saluran air seperti got yang kurang maksimal lebar atau kedalamannya.

Namun, apabila diteliti lebih jauh dua (2) isu masalah ini saling terintegrasi. Terdapat masyarakat yang kurang kesadaran tentang banjir dan juga saluran air seperti got yang kurang maksimal lebar atau kedalamannya dan sungai kewenangannya ada pada dinas PU Kota Semarang sehingga perbedaan pemahaman masalah pada penanganan banjir di Kota Semarang harus dipahami dan dimengerti secara bersama-sama.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dianalisis bahwa hasil penelitian pada tahapan *shared understanding* belum sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash yang menyebutkan bahwa stakeholders harus memiliki pemahaman tentang masalah yang dihadapi pada proses kolaborasi. Proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang belum memiliki pemahaman akan masalah sehingga tahapan ini dikatakan berjalan dengan baik, namun belum optimal.

5. Tipe *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil sementara dapat dikatakan sebagai suatu momentum yang dapat mendukung keberhasilan suatu proses kolaborasi (Arianti & Satlita, 2018). Hasil sementara yang diperoleh dari proses kolaborasi penanganan banjir di Kota Semarang, yaitu Kota Semarang bebas banjir. Selain itu, dalam pembuatan perencanaan strategis, masyarakat dan pihak swasta tidak terlalu dilibatkan oleh pemerintah, segala sesuatunya baik perencanaan dan keputusan diambil oleh pemerintah saja. Mereka akan tahu setelah adanya keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan. Pihak BPBD lebih banyak berdiskusi dengan pemerintah setempat dan kemudian hasil dari keputusan tersebut yang disampaikan kepada masyarakat untuk dapat dilaksanakan bersama. Namun para stakeholders mengatakan dengan adanya rencana strategis yang disusun ini dapat memberikan dampak positif bagi penanganan banjir karena akan mempermudah dan mempercepat upaya dalam penanganan banjir di Kota Semarang dengan sudah adanya agenda yang terstruktur.

Dalam proses *collaborative governance intermediate outcomes* sudah tercapai sesuai dengan yang diinginkan yaitu penanganan banjir di Kota

Semarang yang ditunjukkan dengan adanya beberapa hasil yang diperoleh selama proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Selain itu, seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah melakukan komponen-komponen proses *collaborative* itu sendiri dengan baik, sehingga seharusnya proses pelaksanaan tidak akan sulit. Namun, hasil-hasil yang diperoleh ini tidak berhenti begitu saja sampai pada ini. Pemerintah harus tetap berkolaborasi dan berupaya dalam penanganan banjir di Kota Semarang kedepannya.

Ansell dan Gash dalam pandangannya menyebutkan bahwa hasil sementara atau hasil yang diperoleh merupakan bagian penting dari hasil terbentuknya kepercayaan dan komitmen. Terbentuknya kepercayaan dan komitmen akan memberikan hasil yang maksimal dalam proses kolaborasi. Dalam mencapai hasil dalam proses kolaborasi ada cita-cita atau harapan yang diinginkan oleh stakeholders sehingga mampu memberikan keuntungan bagi mereka, serta disusunnya perencanaan strategis untuk mencapai cita-cita sehingga dalam mencapai cita-cita lebih terstruktur.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dianalisis bahwa tahapan *Intermediate outcomes* yang diperoleh dari hasil *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah sesuai dengan teori Ansell dan Gash yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya proses *collaborative governance* adalah untuk mencapai suatu hasil dan keuntungan dari kolaborasi itu sendiri. Dalam hal ini, proses *collaborative governance* sudah memberikan hasil sementara dengan penanganan banjir di Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur sehingga bisa maksimal dan berdampak baik buat masyarakat.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Banjir Di Kota Semarang

Proses *collaborative governance* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh stakeholders untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri maupun kerjasama dalam menciptakan hal-hal baru. Namun, dalam prosesnya ditemukan beberapa hambatan maupun pendukung dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses *collaborative governance* penanganan banjir di Kota Semarang menurut teori Goldsmith dan Kettl (dalam Irawan, 2017) yang terdiri dari struktur jaringan (*networked structure*), komitmen terhadap proses (*commitment to purpose*), rasa kepercayaan antara stakeholders (*trust among the participants*), *governance*, akses kepada kekuasaan (*access to authority*), pembagian tanggung jawab (*distributive accountability/responsibility*), pembagian informasi (*information sharing*), dan akses terhadap sumberdaya (*access to resources*). Pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang tentu mempunyai faktor pendukung dan penghambat sendiri. Faktor-faktor tersebut dalam Proses *Collaborative Governance* diperoleh sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang dapat didukung oleh beberapa hal. BPBD Kota Semarang merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan banjir. BPBD Kota Semarang tentu tidak dapat berjalan sendiri sehingga perlu membentuk jaringan antara, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Masing-masing stakeholders sudah memahami dan mengerti perannya masing-masing.

a. Networked Structure

Faktor pertama yaitu *networked structure*, disebutkan bahwa *networked structure* dibutuhkan untuk membentuk keterkaitan satu elemen dengan lainnya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. *Networked structure* pada proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang sudah terbentuk dengan dilibatkannya pihak swasta, masyarakat dan UPTD terkait oleh BPBD Kota Semarang.

Membangun jaringan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yaitu BPBD Kota Semarang dan Dinas PU tetapi juga dilakukan oleh pihak swasta dengan yang lainnya. Pelaku Usaha mengatakan bahwa mereka para pelaku usaha sering berdiskusi mengenai hambatan dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dianalisis bahwa indikator *networked structure* pada hasil penelitian sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang menyatakan bahwa struktur jaringan diperlukan untuk membentuk elemen satu dengan lainnya sehingga mencapai tujuan bersama.

Membangun jaringan dalam suatu kolaborasi adalah satu cara dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam menjalankan proses kolaborasi. Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa struktur jaringan sudah terbentuk diantar *stakeholder* sehingga indikator *networked structure* menjadi faktor pendukung dalam menjalankan proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

b. Commitment to Purpose (Komitmen terhadap proses)

Faktor selanjutnya yaitu komitmen terhadap tujuan, dalam mencapai tujuan bersama dalam proses kolaborasi para stakeholders tentu membutuhkan komitmen dari mereka sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efektivitas. Selain itu agar mereka menyadari kepentingan dan keterkaitan antara satu dengan lain dan memahami tanggung jawab yang dimiliki. Kepala Bidang Pencegahan dan Keiapsiagaan BPBD Kota Semarang menyampaikan tanpa adanya komitmen yang serius dalam mencapai tujuan yang diinginkan, proses kolaborasi tentu tidak memiliki arah dan tujuan yang tepat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka di analisis bahwa indikator *commitment to purpose* sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang mengatakan bahwa dalam mencapai tujuan

bersama diperlukan komitmen untuk yang terjalin sehingga mampu mencapai tujuan tersebut. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan bersama, stakeholder sudah memiliki komitmen untuk menjalankan proses kolaborasi sehingga komitmen ini dapat mendukung mereka. Maka, merujuk pada hasil dan teori diatas *commitment to purpose* menjadi faktor pendukung dalam proses kolaborasi yang dilaksanakan.

c. Trust Among the Participants (Kepercayaan dalam proses)

Kepercayaan dalam proses kolaborasi juga merupakan faktor pendukung yang paling penting dalam menjalankan kolaborasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Keiapsiagaan BPBD Kota Semarang menyatakan bahwa tanpa rasa saling percaya kolaborasi tidak akan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pemaparan hasil di atas, maka dianalisis bahwa hasil pada indikator *trust among the participants* sudah sesuai dengan teori Edward Deseve yang menyebutkan bahwa sikap saling percaya antar *stakeholders* dibutuhkan sehingga dalam mencapai tujuan bersama tidak ada rasa curiga. Penelitian yang dilakukan menunjukan akses terhadap kekuasaan juga merupakan salah satu faktor pendukung proses kolaborasi ini. Dimana pemerintah BPBD Kota Semarang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat ataupun pihak swasta untuk berperan aktif dalam penanganan banjir ini secara langsung di lingkungannya masing-masing hasil bahwa dalam proses kolaborasi seluruh stakeholders sudah memiliki rasa saling percaya antar *stakeholders* karena kepercayaan merupakan faktor penting menjalankan kolaborasi yang ditunjukkan dengan adanya saling kerjasama yang terjalin. Maka, merujuk pada hasil di atas dikatakan bahwa *the participants* menjadi faktor pendukung menjalankan proses *trust among collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

d. Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan)

Akses terhadap kekuasaan juga merupakan salah satu faktor pendukung proses kolaborasi ini. Dimana pemerintah BPBD Kota Semarang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat ataupun pihak swasta untuk berperan aktif dalam penanganan banjir ini secara langsung di lingkungannya masing-masing.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dianalisis bahwa indikator *access to authority* sudah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang menyatakan bahwa dalam proses kolaborasi adanya ketentuan yang dilakukan prosedur yang diterima dan diikuti oleh stakeholder lain. Penelitian ditemukan bahwa pemerintah memberikan kekuasaan kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk dapat berperan aktif dengan memberikan informasi, masukan, dan saran serta menjaga lingkungan disekitar daerahnya. Maka merujuk hasil analisis diatas dikatakan

bahwa *access to authority* menjadi faktor pendukung dalam menjalankan kolaborasi.

e. Information Sharing (pembagian informasi)

Faktor pendukung selanjutnya adalah pembagian informasi (*information sharing*), dalam memperoleh informasi stakeholder lainnya yaitu masyarakat dan pelaku usaha mudah untuk mengakses informasi terkait penanganan banjir di Kota Semarang. Pembagian informasi diperoleh dari pengumuman-pengumuman yang diberikan oleh pihak BPBD Kota Semarang. Selain itu, website ataupun media online sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah dalam sebagai alat menyampaikan sumber informasi terkait penanganan banjir di Kota Semarang.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dianalisis bahwa indikator *information sharing*/penerimaan informasi pada proses *collaborative governance* sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang menyatakan bahwa pembagian informasi dilakukan untuk memberikan kemudahan pada stakeholder dalam mengakses informasi penanganan banjir di Kota Semarang. Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa stakeholder lain mudah dalam mengakses informasi mengenai penanganan banjir di Kota Semarang serta penggunaan website dan media onlinenya sudah dikelola dengan baik oleh BPBD Kota Semarang. Maka, melihat hasil analisis di atas, dikatakan *information sharing* menjadi faktor pendukung dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

f. Access to Resources (akses terhadap sumber daya)

Faktor pendukung selanjutnya yaitu akses terhadap sumber daya, khususnya sumber daya manusia, masyarakat memberikan pendapat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung dan berperan penting melihat bahwa SDM Kota Semarang siap dalam Penanganan banjir di Kota Semarang.

Bedasarkan wawancara diatas mengenai sumber daya manusia merupakan faktor pendukung proses *collaborative governance*. Dimana masyarakat percaya dengan pemimpinnya Walikota Hendrar Prihardi dengan slogan bergerak bersama menjadi Semarang Hebat bisa menghasilkan jajaran pemerintah yang baik, lalu dengan popilasi yang ada di Kota Semarang bisa bergotong royong dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa hasil pada *access to resources* yang sudah sesuai dengan teori Edward Deseve adalah akses terhadap sumber daya manusia. Edward Deseve menyebutkan bahwa dalam proses kolaborasi membutuhkan ketersediaan sumber daya baik keuangan, teknis dan manusia untuk dapat mencapai tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *stakeholders* lain khususnya masyarakat sudah siap dan mampu untuk menjalankan proses kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Maka merujuk pada penelitian dan teori

diatas dikatakan bahwa akses sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam menjalankan kolaborasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dijelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang terdiri dari beberapa indikator yaitu struktur jaringan (*networked structure*), komitmen terhadap tujuan (*commitmen to process*), kepercayaan antar partisipan (*trust among the participants*), akses terhadap kekuasaan (*access to authority*), penerimaan informasi (*information sharing*), dan akses terhadap sumber daya (*access to resources*). Faktor akses sumber daya terdiri dari 3 diantaranya ;sumber daya teknis, sumberdaya manusia dan sumber daya keuangan. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung akses sumber daya yaitu sumber daya manusia, sedangkan sumber daya teknis dan keuangan tidak menjadi faktor pendukung pada proses *collaborative governance*. Seluruh sumber daya manusia yaitu masyarakat percaya dengan pemimpinnya Walikota Hendrar Prihardi dengan slogan bergerak bersama menjadi Semarang Hebat bisa menghasilkan jajaran pemerintah yang baik, lalu dengan popilasi yang ada di Kota Semarang bisa bergotong royong dalam penanganan banjir di Kota Semarang

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya proses *collaborative governance* penanganan banjir di Kota Semarang tentu tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala kepada para stakeholders yang terlibat di dalamnya. Faktor penghambat proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah *governance*, pembagian akuntabilitas/responsibilitas (*distributive accountability/responsibility*), pembagian informasi (*information sharing*) dan akses terhadap sumber daya (*access to resources*), yaitu sumber daya teknis dan keuangan.

a. Governance

Faktor penghambat pertama yaitu *Governance*, proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat masih dibatasi oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dianalisis bahwa indikator *Governance* yang disampaikan oleh Edward Deseve tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan. Edward Deseve menyebutkan bahwa *governance* merupakan interaksi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah masih membatasi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Maka, disimpulkan bahwa *Governance* menjadi faktor penghambat pada proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang Pemerintah seharusnya dapat membangun interaksi yang melekat antara pemerintah dengan stakeholder lainnya sehingga akan lebih membangun komunikasi yang lebih baik.

b. *Distributive Accountability/ Responsibility*

Selanjutnya yaitu pembagian pembuatan keputusan, pembagian pembuatan keputusan pada proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Semarang masih dimiliki oleh pemerintah selaku pemilik wewenang tertinggi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dianalisis indikator *distributive accountability/responsibility* yang ditemukan dalam hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve. Edward Deseve menyatakan bahwa pembagian akuntabilitas dilakukan secara bersama dengan stakeholder lainnya, namun pada proses *collaborative governance* penanganan banjir di Kota Semarang pembagian akuntabilitas masih dipegang oleh pemerintah. Maka, merujuk pada hasil penelitian dan teori diatas dikatakan bahwa *distributive accountability/responsibility* menjadi faktor penghambat dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

c. *Access to Resources*

Terakhir, faktor penghambatnya yaitu akses sumber daya, secara teknis. Penghambat secara teknis adalah adanya keterbatasan dalam pengelolaan drainase kewenangannya masih terkotak-kotak antar OPD di Kota Semarang maupun dengan pemerintah kabupaten lain.

Pihak BPBD kota Semarang menyatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah adanya keterbatasan dalam pengelolaan drainase kewenangannya masih terkotak-kotak antar OPD di Kota Semarang maupun dengan pemerintah kabupaten lain.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka indikator akses sumber daya khususnya teknis pada penelitian tidak menunjukkan kesesuaian dengan teori yang disampaikan oleh Edward Deseve yang menyatakan bahwa dalam proses *collaborative governance* membutuhkan sumber daya untuk dapat membantu berjalannya proses *collaborative governance* tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi secara teknis adalah adanya keterbatasan dalam pengelolaan drainase kewenangannya masih terkotak-kotak antar OPD di Kota Semarang maupun dengan pemerintah kabupaten lain. Maka, melihat analisis dan teori di atas dikatakan bahwa akses sumber daya secara teknis menjadi faktor penghambat pada proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang terdiri dari beberapa indikator yaitu *Governance, Distributive Accountability/Responsibility, dan Access to Resources*. I. Faktor akses sumber daya terdiri dari 3 komponen, pada II. penelitian yang faktor penghambat yaitu sumber daya teknis. *Stakeholders* menyatakan bahwa adanya keterbatasan dalam pengelolaan drainase kewenangannya masih terkotak-kotak antar OPD di Kota Semarang maupun dengan pemerintah kabupaten lain.

Selain itu, faktor penghambat yang ditemukan lainnya yaitu proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat masih dibatasi oleh pemerintah dan pembagian pembuatan keputusan masih dimiliki oleh pemerintah.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan dibawah ini:

1. Proses Collaborative Governance Program Resilient City Dalam Penanganan Banjir Di Kota Semarang

Proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang melibatkan Walikota Semarang, BPBD Kota Semarang, pihak swasta, dan masyarakat menunjukkan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan baik, yang terdiri dari *face to face dialouge, trust building, commitment to process, share understanding, dan intermediate outcomes*. Namun, pada indikator *share understanding* belum optimal dikarenakan adanya perbedaan pemahaman masalah yang dihadapi antara pihak swasta dan masyarakat dengan BPBD Kota Semarang. Maka stakeholders harus membangun komunikasi yang lebih dalam mengoptimalkan perannya.

2. Faktor pendukung dan penghambat proses collaborative governance Program Resilient City Dalam Penanganan Banjir Di Kota Semarang

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah *networked structure, commitment to process, trust among the participants, access to authority, information sharing, dan access to resouse*. Struktur jaringan yang terbentuk menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terbangun dengan baik satu dengan lainnya, menjadi teman diskusi dan tidak ada herarki dalam jaringan ini. Stakeholders sudah memiliki komitmen melalui usaha-usaha yang dilalui masing-masing dan memiliki kepercayaan satu dengan lainnya. Informasi yang diakses dengan mudah . Terakhir, pendukung dalam kolaborasi adalah sumber daya manusia yang terlibat.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam proses CG dalam penanganan banjir di Kota Semarang adalah *governance, distributive accoutability/ responsible, dan acces to resouse*. Penghambat yang ditemui bisa datang dari pemerintah itu sendiri, dimana adanya minim transparansi dari pemerintah. Tidak adanya pembagian keputusan yang dapat menghambat kolaborasi. Terakhir, yang menjadi penghambat adalah peaksanaan teknis karena kendala kewenangan yang terkotak-kotak.

Daftar Pustaka

Anies. 2017. *Negara Sejuta Bencana*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media

- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. JPART 18: 543-571
- Beatrix, H. 2020. Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik. *Journal Edukasi Nonformal*, 1(2), Hal. 94–102.
- BMKG. (2021 February 07). Hujan Ekstrem Memicu Banjir di Semarang. Retrieved on 03 July 2023, from <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-hujan-ekstrem-memicu-banjir-di-semarang>
- BPBD, Kota Semrang. (2023 July 05). Data Bencana. Retrieved on 05 July 2023, from <https://bpbd.semarangkota.go.id/pages/data-bencana>
- DeSeve, G. E. 2007. Creating managed networks as a response to societal challenges. In *The business of government*. IBM center for business of government.
- Donahue, J. 2004. On Collaborative Governance. *Academic Medicine*, 83(6), 568–573.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Ghozali, A., Ariyaningsih, Sukmara, R. B., & Aulia, B. U. 2016. A comparative study of climate change mitigation and adaptation of flood management between Ayutthaya City (Thailand) and Samarinda City (Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 424–429.
- Heru, B., & Hendro, R. 2020. Strategi Ketahanan Kota Berkelanjutan Terhadap Bencana Banjir: Birmingham Dan Semarang. *Jurnal Aaki/ Volume 1*, Issn No.2722-175X, 85-95.
- Jawa Pos. (2023 Mey 02). Penanganan Banjir Wilayah Timur dan Dinar Indah Jadi Prioritas. Retrieved on 03 July 2023, from <https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721408656/penanganan-banjir-wilayah-timur-dan-dinar-indah-jadi-prioritas>
- Kariem, M. Q., & Afrijal. 2021. Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 6(3), Hal. 107-114.
- Khambali. 2017. *Menejemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. 2018. Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy*.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Neise, T., & Diez, J. R. 2018. Firms' contribution to flood risk reduction-scenario-based experiments from Jakarta and Semarang, Indonesia. *Procedia Engineering*, 212, 567– 574.
- Permatasari, I. S., Nurcahyanto, H., & Musawa, M. 2012. Strategi Penanganan Kebencanaan di Kota Semarang (Studi Banjir dan Rob). *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 191-200.
- Retno, S. A., Hardi, W., & Rachim, A. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: DAP Press.
- Sun, X. 2017. Research and Prospect of Collaborative Governance Theory. *Public Policy and Administration Research*, 7(7), 50-53.
- Sunarharum, T. M., Sloan, M., & Susilawati, C. 2014. Re-framing planning decision-making: Increasing flood resilience in Jakarta. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 5(3), 230–242